

TAJUK RENCANA

'Bersama Bangkitkan Jogja'

BANK BPD DIY pada 1-15 Desember ini menggelar program aktivasi sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-59 Bank BPD DIY yang bertema 'Merdekakan Transaksimu Bangkitkan Usahamu'. Dalam kegiatan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan *Kedaulatan Rakyat* ini, 250 UMKM mengadakan diskon menarik dengan tema 'Bersama Bangkitkan Jogja'.

Menurut Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmat, program ini ditargetkan bisa memanfaatkan layanan pembayaran non-tunai *QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT)* Bank BPD DIY. Selain meningkatkan daya beli UMKM, layanan QUAT menjadi solusi bertransaksi di tengah masa pandemi Covid-19, yakni transaksi secara digital, tidak harus langsung memegang uang.

Peluncuran program tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank BPD DIY dalam meningkatkan potensi ekonomi dan mengoptimalkan perputaran transaksi serta penempatan dana daerah. Strategi itu diambil sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, yaitu untuk memajukan UMKM, karena sektor ini menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian di DIY. Dengan membangkitkan UMKM, secara otomatis akan menggerakkan perekonomian daerah yang sekitar sembilan bulan ini terdampak pandemi Covid-19.

Kalau dicermati, program Bank BPD DIY ini sejalan dengan tekad

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diungkapkan akhir Oktober lalu, bahwa Pemda DIY ingin meningkatkan kelas UMKM agar punya ruang di kawasan Malioboro, yang merupakan salah satu ikon kepariwisataan di DIY. Hal itu dilakukan karena produk-produk UMKM di DIY dinilai sangat bagus dan variatif. Untuk itu, Pemda DIY membeli Hotel Mutiara yang masuk kawasan Sumbu Filosofis, selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai Sentra UMKM.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY Bidang Perdagangan Luar Negeri, Wawan Harmawan saat itu minta agar pemanfaatan Sentra UMKM di Malioboro dikaji lebih detil, dengan konsep mempromosikan produk-produk UMKM DIY yang berkualitas dan berciri khas DIY. Dengan demikian diharapkan, produk UMKM yang ditampilkan benar-benar produk unggulan dan berkualitas.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, tentu harus didukung oleh semua pihak. Dukungan Bank BPD DIY tentu akan berdampak besar terhadap kebangkitan UMKM di DIY dan kebangkitan ekonomi DIY.

Selamat HUT ke-59 Bank BPD DIY. Merdekakan Transaksimu, Bangkitkan Usahamu. Bersama Bangkitkan Jogja. □



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Peluang Baru Pariwisata

PANDEMI Covid-19 telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Covid-19 kini masih menjadi tantangan terbesar bagi seluruh masyarakat. Yaitu adanya keterbatasan dalam melakukan pergerakan di berbagai bidang untuk aktivitas sehari-hari.

Saat ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang terkena dampak krisis pandemi Covid-19. Munculnya istilah adaptasi kebiasaan baru yang menegaskan bahwa masyarakat harus berkompromi dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Ini merupakan wajah baru khususnya dalam industri pariwisata.

Dalam era ini pariwisata sudah membuka peluang baru dan bertransformasi untuk bangkit dari pandemi. Esensinya pariwisata harus dapat mengubah konsep pariwisata baru untuk penyesuaian di masa pandemi.

Memang saat ini pariwisata sedang berusaha untuk memulihkan keadaan. Banyak sekali yang turut aktif membantu pariwisata mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Tak lain tujuannya adalah untuk bisa bangkit dari kelemahan perekonomian yang merugikan sektor pariwisata.

Tahapan transformasi pariwisata ini menekankan protokol pada konsep kebersihan, kesehatan dan keselamatan (Cleanliness, Health, and Safety /CHS). Dimulai dari simulasi, sosialisasi dan publikasi kepada publik serta dilakukannya uji coba sebagai tatanan adaptasi kebiasaan baru yang kini menjadi peluang baru industri pariwisata.

Selain itu juga penyediaan tem-

pat cuci tangan bagi wisatawan. Peraturan yang ketat tentang penggunaan masker. Dan menjaga jarak dengan pengunjung lain sangatlah perlu digalakkan dengan tegas dan sesuai protokol kesehatan menurut standar WHO.

Dalam hal ini industri pariwisata harus dapat mempersiapkan dengan matang transformasi perubahan yang ada. Agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penularan Covid 19 di arena wisata.

Pentingnya komitmen dalam transformasi pariwisata ini adalah hal yang utama. Karena transformasi ini akan menjadi acuan untuk melihat peluang baru dari keberlanjutan pariwisata untuk kedepannya. Dalam penerapannya perubahan yang ada pada sektor pariwisata justru akan membuat para wisatawan menjadi lebih penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru.

Inovasi para pelaku wisata saat ini sangat dibutuhkan mengingat pandemi belum juga berakhir. Sehingga menyajikan transformasi pariwisata secara aman dengan kesesuaian pandemi akan ada preferensi wisatawan atau masyarakat yang searah dengan terciptanya peluang baru di industri pariwisata.

Transformasi ini harus dapat dipertahankan. Pelaku wisata memperhatikan dengan jeli setiap perubahan yang terjadi, sehingga terciptalah dampak-dampak yang tidak hanya berfokus pada pelaku wisata, namun juga masyarakat sekitar.

Mutiara Maulid, Pumaningtyas
Mahasiswa UGM.

Suap Politik Jelang Pilkada

M Johan Komara

MENJELANG hari 'H' pilkada, fenomena suap politik (*money politic*) mengalami peningkatan. Ini ditandai dengan maraknya postingan seputar sogokan politik di medsos dan juga berita media masa di berbagai daerah yang sedang melaksanakan pilkada. Beberapa foto dan video yang diduga sebagai bentuk suap politik diunggah ke medsos. Beragam komentar netizen muncul, mulai yang nyinyir, acuh tak acuh, sampai yang defensif dan menjustifikasi sebagai bentuk kebaikan hati.

Suap politik merupakan cara kuno dalam mempengaruhi pilihan untuk memenangkan kompetisi politik dengan imbalan sejumlah uang. Sementara cara lazim di era modern adalah dengan adu rasionalitas, *track record*, gagasan, program dan kebijakan yang akan dilaksanakan kalau kelak terpilih.

Ruang Barter

Suap politik ditengarai sebagai salah satu sebab dari politik berbiaya mahal dan berpotensi menimbulkan perilaku koruptif takkala terpilih di kemudian hari. Mulai dari manipulasi anggaran sampai dengan suap jabatan. Namun berbagai upaya masif yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, KPK dan juga dari masyarakat sipil seperti tidak cukup taji untuk menghentikan 'kelaziman' praktik suap politik menjelang *coblosan* ini.

Politik adalah seni barter kepentingan dan imbalan (*who gets what, when and how*). Siapa yang jago mempraktikkan logika ini dengan baik, dia berpeluang besar untuk jadi pemenang kompetisi. Tidak hanya dalam urusan politik, prinsip ini juga sering dijumpai dalam kompetisi bisnis dan transaksi jual beli lainnya.

Dalam konteks pilkada, paslon berkepentingan untuk menjadi juara kompetisi dan terpilih sebagai kepala daerah. Sementara pemilih, baik itu dari unsur petani, nelayan, buruh,



KR-JOKO SANTOSO

nya kelak kalau terpilih. Merebaknya suap politik, baik yang sembunyi atau terekam kamera, tidak lepas dari adanya *supply and demand* politik. Inisiator suap politik tidak selalu dari paslon namun bisa juga dari masyarakat. Masalahnya kalau kedua belah pihak, paslon dan pemilih samasama bersikap oportunis dan tergiur membuat simplifikasi bahwa imbalan politik yang diberikan dalam bentuk uang. Paslon tidak punya beban moral dan tidak punya utang politik lagi karena sudah dianggap beli putus dan lunas di muka, ditransaksikan sebelum hari 'H' tiba. Sebaliknya kalau paslon

tidak memberikan suap politik tetapi menggunakan gagasan, program dan kebijakan sebagai imbalan kepada pemilih maka masyarakat tanpa ragu-ragu dapat mengahaminya di kemudian hari.

Mulai Sekarang

Wujud pemerintah daerah tidak lepas cerminan masyarakat sendiri. Kalau masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, bebas suap dan tidak korupsi maka mulailah dari sekarang sebelum masa *coblosan*. Jangan pernah mau menerima suap ataupun menggoda paslon agar memberi sogokan politik. Begitu suap politik diterima, berarti masyarakat ikut andil besar dalam menciptakan perilaku pemerintahan ke depan yang permisif dan koruptif.

Demokrasi tidak berhenti saat *coblosan* saja. Namun setelah paslon dilantik sebagai kepala daerah sampai akhir periode jabatan, masyarakat tetap diminta untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Jika masyarakat sudah diberi suap politik, maka ruang untuk bersuara melakukan pengawasan maupun menagih utang janji kampanye akan tertutup. Maka gunakan hak pilih di TPS pada tanggal 9 Desember dengan tidak menerima uang sogokan politik dari paslon manapun. □

***) Mohammad Johan Komara,**
Peneliti Senior JaDI DIY, Alumni Student Mobility Exchange Program at Master of Public Administration Khon Kaen University 2017

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Siapakah Kembali Belajar Luring?

Sudaryanto

SURAT Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyesuaian Pembelajaran di Sekolah Saat Masa Pandemi memang memperbolehkan sekolah yang sudah siap untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka tahun 2021. Namun, keputusan akhirnya tetap diserahkan kepada tiap-tiap pemerintah daerah. Pertanyaannya, siapakah kita kembali belajar luring?

Di kalangan masyarakat terjadi pro-kontra terkait rencana pembelajaran tatap muka atau luring. Pihak pro melihat bahwa pembelajaran nontatap muka atau daring dianggap melelahkan bagi guru dan siswa. Sementara itu, pihak kontra memandang bahwa pembelajaran daring menjadi jalan terbaik bagiantisipasi atas penyebaran virus korona berupa klaster sekolah.

DIY

Terkait itu, pihak Pemda DIY belum memberikan lampu hijau atas rencana pembelajaran tatap muka. Katanya, akan melakukan kajian bersama lebih dulu (KR, 28/11). Langkah yang patut diapresiasi dan diberikan usul agar kajian secara komprehensif dilakukan banyak pihak. Di antaranya, para siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dokter dan tenaga kesehatan, hingga kepala daerah.

Ada beberapa pertimbangan. Pertama, para siswa agaknya mengalami kebosanan dalam belajar daring. Dari segi waktu, belajar daring memang efektif. Tapi, dari segi manajemen pembelajaran, belajar daring sungguh melelahkan. Ditambah lagi kondisi beban ekonomi terkait penggunaan pulsa. Untung ada pemberian kuota internet per bulan dari Kemendikbud, sehingga mengurangi beban ekonomi tadi.

Kedua, para guru dan orang tua meng-

alami kerepotan yang luar biasa. Di satu sisi, para guru yang memiliki anak-anak yang sedang bersekolah harus berperan ganda: sebagai guru di sekolah dan di rumah. Di sisi lain, para orang tua yang bekerja di luar rumah harus mendampingi anak-anak saat belajar daring. Ada orang tua yang sabar; ada pula orang tua yang tidak sabar sehingga mengalami stres dan darah tinggi (darting) di rumah.

Ketiga, para kepala sekolah perlu menerapkan aturan protokol kesehatan secara ketat. Para siswa yang akan belajar di sekolah harus dicek suhu tubuhnya dulu, kemudian mereka wajib memakai masker dan menghindari kerumunan. Soal kerumunan itu yang agak sulit diantisipasi karena umumnya siswa-siswa ingin ngobrol secara berkelompok. Di sini para kepala sekolah dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran tatap muka jika rencana itu disetujui pada Januari 2021.

Dokter

Keempat, terkait butir sebelumnya, masyarakat di sekitar sekolah harus proaktif dalam menerapkan aturan protokol kesehatan. Apabila menjumpai siswa atau guru yang tidak memakai masker, wajib diingatkan masyarakat. Apabila menjumpai siswa berkerumunan di tepi jalan atau warung, wajib pula diingatkan oleh pihak masyarakat. Dengan cara begitu, saya yakin, siswa dan sekolah dapat terhindar dari penyebaran virus Covid-19.

Kelima, pihak sekolah da-

pat mengundang dokter atau tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan secara daring. Lewat penyuluhan itu, pihak sekolah dapat mengetahui gejala-gejala awal tubuh teresang virus Covid-19 dan proses penyembuhannya. Pengetahuan itu sangat penting, mengingat belum semua siswa dan guru memahami akan penyebaran virus Covid-19 dan penanggulangannya secara benar.

Semoga saja masukan di atas dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua, termasuk Pemda DIY, terkait rencana pembelajaran tatap muka pada tahun depan. Yang terpenting, para siswa selalu sehat dan semangat dalam belajar, baik daring maupun luring. Demikian halnya dengan para guru. Di atas semua itu, kita tetap berdoa agar Indonesia segera pulih dari masa pandemi dan kembali ke kehidupan normal seperti dulu. □

***) Sudaryanto, MPd, Dosen PBSI**
FKIP UAD; Mahasiswa S-3 IPB UNY.

Pojok KR

Seka DIY mengingatkan bahwa penyadaran protokol kesehatan harus lebih gencar.

-- Tambah gencar.

Sejumlah destinasi di DIY sudah terverifikasi sehingga aman dikunjungi.

-- Juga nyaman.

Utung penanganan Covid-19, Baznas Kota Yogyakarta distribusikan Rp 3,5 miliar.

-- Catat itu.



Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grufas:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Cunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.